

REGIONAL > NUSANTARA > PUBLIKASIKAN "PAUGERAN"

Publikasikan "Paugeran"

Parentah Hageng Keraton: Perintah Sultan yang Harus Ditaati

 Cetak | 11 Maret 2015 12 dibaca  0 komentar

YOGYAKARTA, KOMPAS — Keraton Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman diminta memublikasikan paugeran atau adat istiadat tentang suksesi kepemimpinan di dua institusi itu. Ini untuk menghindari perdebatan dan ketidakpastian ihwal pergantian pemimpin di Keraton dan Kadipaten yang bisa berdampak terhadap pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta.



KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Bayu Dardias

"*Paugeran* terkait suksesi kepemimpinan di Keraton Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman sebaiknya dipublikasikan agar tidak ada keresahan di masyarakat ihwal suksesi kepemimpinan di dua institusi itu," kata dosen jurusan politik dan pemerintahan Universitas Gadjah Mada, Bayu Dardias, Selasa (10/3) di Yogyakarta.

Sebagaimana diberitakan, perdebatan ihwal suksesi kepemimpinan di Keraton Yogyakarta mengemuka akhir-akhir ini. Perdebatan itu muncul saat DPRD DIY membahas Rancangan Peraturan Daerah Istimewa DIY tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur.

Sejumlah pihak, termasuk Sultan Hamengku Buwono X, Raja Keraton Yogyakarta sekaligus Gubernur DIY, meminta perubahan ihwal pasal dalam Rancangan Peraturan Daerah Istimewa itu yang secara tidak langsung mengharuskan jabatan Gubernur dan Wagub DIY diduduki oleh laki-laki. Namun, usulan itu ditentang sejumlah anggota DPRD DIY dan tiga adik Sultan.

Karena Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY menyatakan Gubernur DIY dijabat oleh Raja Keraton Yogyakarta, perdebatan pun melebar ke suksesi Raja Keraton Yogyakarta. Apalagi, Sultan tidak memiliki anak laki-laki.

Jika Keraton Yogyakarta bersedia memublikasikan *paugeran* ihwal suksesi raja, menurut Bayu, perdebatan terkait jenis kelamin calon Gubernur DIY akan selesai. Perbedaan pendapat di kalangan internal keraton soal suksesi pun akan selesai.

Bayu mengingatkan, sesudah UU Keistimewaan DIY disahkan, suksesi kepemimpinan di Keraton Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman tak lagi hanya merupakan masalah internal dua institusi itu. Suksesi itu juga urusan publik karena pemimpin di dua institusi tersebut otomatis menjadi gubernur dan wagub.

"Memang Keraton dan Kadipaten punya otonomi menentukan pemimpin di kedua institusi itu. Namun, masyarakat perlu tahu mekanisme penentuan pemimpinnya," ujar Bayu.

Wakil Ketua DPRD DIY Arif Noor Hartanto juga mengusulkan Keraton dan Kadipaten segera memublikasikan *paugeran* tersebut agar ada kepastian soal mekanisme suksesi. Apalagi, UU Keistimewaan DIY juga memerintahkan Keraton dan Kadipaten mengumumkan peraturan di kedua institusi itu.

Pasal 43 UU Keistimewaan DIY menyatakan, Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam bertugas menyempurnakan dan menyesuaikan peraturan di Keraton dan Kadipaten, lalu mengumumkan hasil penyempurnaan dan penyesuaian aturan itu kepada masyarakat.

Beda pendapat

Publikasi *paugeran* juga penting karena selama ini kerabat Keraton Yogyakarta kerap berbeda pendapat soal suksesi. Adik Sultan Hamengku Buwono X, Gusti Bendara Pangeran Haryo Prabukusumo, mengatakan, berdasarkan *paugeran* yang berlaku, Raja Keraton Yogyakarta harus dijabat laki-laki. Aturan itu antara lain terlihat dari pengalaman Sultan pertama hingga kesepuluh yang selalu dijabat laki-laki.

Selain itu, berbagai hal yang melekat pada Raja Keraton Yogyakarta, misalnya gelar, busana, dan senjata, juga menunjukkan sang raja harus dijabat laki-laki. Prabukusumo juga menyatakan, *paugeran* itu tak boleh dilanggar, termasuk oleh Sultan yang sedang bertakhta.

Namun, Parentah Hageng Keraton Yogyakarta Kanjeng Raden Tumenggung Yudhadiningrat tidak sependapat dengan hal itu. Dia mengatakan, *paugeran* tertinggi di Keraton Yogyakarta adalah perintah Sultan. "Apa yang menjadi *dhawuh* Dalem (perintah Sultan) itulah yang harus ditaati," katanya.

Sultan sudah mengeluarkan sabda tama atau amanat terkait perdebatan ihwal suksesi kepemimpinan di Keraton Yogyakarta, Jumat (6/3). Dalam sabda tama itu, Sultan meminta para kerabat keraton tidak lagi berkomentar ihwal suksesi karena tidak seorang pun bisa mendahului titah raja. **(HRS)**

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 11 Maret 2015, di halaman 23 dengan judul "Publikasikan "Paugeran"".

Facebook

0

Google

0

Tweet

0

KOMENTAR



Bayu Kurniadi

Tulis Komentar...

Kirim



KOMPAS

AMANAT HATI NURANI RAKYAT

Harian Kompas adalah surat kabar Indonesia yang berkantor pusat di Jakarta. Kompas diterbitkan oleh PT Kompas Media Nusantara yang merupakan bagian dari kelompok usaha Kompas Gramedia (KG), yang didirikan oleh PK. Ojong (almarhum) dan Jakob Oetama sejak 28 Juni 1965.

Mengusung semboyan "Amanat Hati Nurani Rakyat", Kompas dikenal sebagai sumber informasi tepercaya, akurat, dan mendalam.

KRITIK & SARAN

NEWSLETTER

REDAKSI

-  Gedung Kompas Gramedia
Jalan Palmerah Selatan 26-28
Jakarta 10270 Indonesia
-  021 - 534 7710/20/30, 530 2200

IKLAN

-  Gedung Kompas Gramedia
Jalan Palmerah Selatan 15
Jakarta 10270 Indonesia
-  021 - 5367 9909, 5367 9599
-  kompas@kompas.com

TENTANG KAMI

Profil Perusahaan
Tonggak Sejarah

PRODUK

KOMPAS Kiosk
print.kompas.com
KOMPAS ePaper

IKLAN

Tarif Iklan Reguler
Tarif Iklan Klasika
Info Klasika